

Judul : DPR Endus Pemborosan Komponen Biaya Haji
Tanggal : Sabtu, 28 Januari 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 1

DPR Endus Pemborosan Komponen Biaya Haji

Angka dari berbagai komponen, seperti penerbangan, biaya catering, sewa hotel masih menggunakan perkiraan angka tertinggi.

DINDA SHABRINA
dinda@mediaindonesia.com

ANGGOTA Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf mengendus aroma pemborosan dalam susunan biaya haji yang diusulkan Kementerian Agama, antara lain angka dari berbagai komponen seperti penerbangan, biaya catering, sewa hotel masih menggunakan perkiraan angka tertinggi.

"Ini sudah disebut-sebut oleh KPK soal efisiensi. Saya kira kita perlu melakukan koreksi. Misalnya, penerbangan yang Rp33 juta itu harus turun. Ilustrasi yang saya sampaikan sederhana. Kalau hari ini kita berangkat, tiket ekonomi pulang-pergi itu cuma US\$900. Kalau US\$900 dikali 2 ada 1.800. Berarti kalau 1.800, kurang lebih Rp26 juta-Rp27 juta," ujar Bukhori dalam rapat dengar pendapat di DPR, Kamis (26/1).

Bukhori juga mengkritisi terkait pemilihan hotel yang diusulkan. Menurut dia, Kemenag tidak perlu mencari hotel zonasi yang dekat dengan tempat-tempat ibadah. Sebab,

hotel zonasi ini akan membebankan biaya tambahan sebesar 30%.

Belum lagi bus selawat yang dinilai semestinya bisa dibebankan kepada pihak hotel. "Bus selawat, saya lihat ada biaya Rp120 miliar. Itu jangan kita bayar sendiri. Itu dibebankan ke hotel," pungkasnya.

Sementara itu, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas kemarin menyambangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi guna membahas seputar polemik penyelenggaraan ibadah haji dan pengelolaan dana haji.

Menag mengatakan kedatangan-nya ke KPK untuk membahas saran dan rekomendasi KPK kepada Kemenag. Masih ada dua rekomendasi yang belum terealisasi, yaitu yang berhubungan dengan UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. "Kedua rekomendasi masih dibahas di Kemenag. Naskah akademiknya sudah selesai," ujar Menag.

Terkait biaya, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan KPK me-

Peserta Ibadah Haji 2023

- Total: 221.000 jemaah
- Haji reguler: 203.320 jemaah
- Haji khusus: 17.680 jemaah
- Jemaah reguler yang belum melunasi biaya haji: 108 ribu jemaah

Progres Polemik Biaya Haji Naik

- Rekomendasi Komisi VIII DPR RI (Dalam rapat dengar pendapat RDP BPH 2023)
- Agar Kemenag dan Kemenkes bisa mempersiapkan peran terhadap anggaran BPH
- Perusahaan negara seperti Garuda Indonesia dan Angkasa Pura diminta membantu menekan biaya haji
- Meminta Kemerkas menyiapkan alokasi anggaran tersendiri untuk menekan biaya haji

Sumber: DPR RI/Kemenag Litbang M

iliki perhatian khusus terkait penetapan biaya haji sejak 2019. Bahkan KPK sudah memiliki dua kajian khusus yang dibuat pada 2019 dan 2020.

Menurut dia, biaya haji yang ideal dan tidak memberatkan masyarakat berada di angka Rp35 juta sampai Rp40 juta. Kajian KPK menyebut nominal itu cukup untuk membayar kebutuhan jemaah beribadah.

Kurang kreatif

Ekonom Universitas Indonesia M Budi Prasetyo mengkritisi Badan Pe-

ngelola Keuangan Haji (BPKH) yang dinilai kurang kreatif dalam mengelola dana setoran awal jemaah haji. Dia juga mempertanyakan mengapa nilai manfaat yang dihasilkan per tahun hanya 6,2%.

Budi mengatakan, jika melihat panduan atau kebijakan alokasi investasi yang harus dipenuhi BPKH, sebetulnya dana setoran awal jemaah haji bisa diinvestasikan ke dalam bentuk emas, investasi langsung atau investasi lainnya, ataupun surat berharga syariah dengan maksimal besaran proporsinya sekitar 5%.

Budi menyampaikan, jika skenario yang digunakan nanti 55:45 dan bukan lagi sesuai usulan Kemenag (70:30), sebenarnya keberlanjutan dana haji yang ada di BPKH juga bisa bertahan hingga 15 tahun ke depan.

Ekonom UI itu lalu memberikan alternatif kebijakan yang mungkin bisa diadopsi Indonesia dalam persoalan penarikan biaya haji. Dia menyebut, *mix policy* mungkin saja bisa diterapkan. "*Mix policy* antara kuota haji dan berapa persen *financial assistance* biaya haji yang harus ditanggung oleh jemaah dan berapa yang harus berasal dari nilai manfaat," ujarnya dalam webinar Menilik Usulan Kenaikan Biaya Haji, kemarin. (Can/X-11)